

2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara Meguwo, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta 55282

Telp. : (0274) 885147

Surel : disnakertrans@jogjaprov.go.id

Laman : nakertrans.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022–2027. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 13 Februari 2025

Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,



Aria Nugraha, ST., M.Eng. *f*

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2024 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja” :
 - Diukur dengan indikator Tingkat produktivitas DIY (PDRB dibagi penduduk yang bekerja).
 - Capaian indikator tujuan didukung oleh kinerja 5 (lima) Sasaran Strategis, yakni Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, Meningkatnya Kesempatan Kerja, Meningkatnya layanan ketenagakerjaan, Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat.
 - Target capaian indikator tujuan tahun 2024 sebesar Rp 54,09 juta/tenaga kerja, terealisasi Rp 57,08 juta/tenaga kerja. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 105.53%.
 - Dibandingkan capaian indikator tujuan tahun 2023, capaian tahun 2024 mengalami kenaikan 1,64 poin atau 2,96 %.
2. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja”:

Diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

 - 1). Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan (jumlah peserta pelatihan yang dapat ditempatkan di sektor formal dan berwirausaha dibagi dengan peserta pelatihan dikali 100%).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
 - Target capaian indikator 1) sasaran 1 tahun 2024 sebesar 75%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 75%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%
 - Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan capaian indikator tahun 2023 karena tahun 2023 tidak ada target (target 0) sehingga realisasi tidak dihitung.
 - 2). Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik (Jumlah perusahaan yang diukur dengan hasil produktivitas baik dibagi jumlah perusahaan yang diukur produktivitasnya dikali 100%).

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Target capaian indikator 2) sasaran 1 tahun 2024 sebesar 65%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 68%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 104.62%
- Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan capaian indikator tahun 2023 karena tahun 2023 tidak ada target (target 0) sehingga realisasi tidak dihitung.

3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Kesempatan Kerja”:

- Diukur dengan indikator Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja (Rata-rata persentase penempatan dan persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja)
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 67.5%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 87%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 128.89%
- Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan capaian indikator tahun 2023 karena tahun 2023 tidak ada target (target 0) sehingga realisasi tidak dihitung.

4. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan”:

Diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

- 1). Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (kumulatif)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - Target capaian indikator 1) sasaran 3 tahun 2024 sebesar 2629 perusahaan; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 2630 perusahaan. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,04%
 - Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan capaian indikator tahun 2023 karena tahun 2023 tidak ada target (target 0) sehingga realisasi tidak dihitung.
- 2). Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 (kumulatif).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Target capaian indikator 2) sasaran 3 tahun 2024 sebesar 2748 perusahaan; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 2750 perusahaan. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100.07%

- Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan capaian indikator tahun 2023 karena tahun 2023 tidak ada target (target 0) sehingga realisasi tidak dihitung.
5. Capaian sasaran strategis 4 “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah (Nilai Kategori Reformasi Birokrasi)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - Target capaian indikator sasaran 4 tahun 2024 kategori A (nilai 94,46) sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi kategori A (nilai 93,93). Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%
 - Capaian indikator ini sama dibandingkan capaian indikator tahun 2023.
6. Capaian sasaran strategis 5 “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat”:
- Diukur dengan indikator Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi (Jumlah transmigran yang menetap di lokasi pada tahun n dibagi dengan jumlah transmigran yang ditempatkan pada tahun n-2 kali 100%)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
 - Target capaian indikator sasaran 5 tahun 2024 sebesar 90% sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 111,11%
 - Capaian indikator ini sama dibandingkan capaian indikator tahun 2023.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi dalam industri dan dunia kerja antara lain digitalisasi, otomatisasi, menuntut pemenuhan kebutuhan akan ketrampilan baru sehingga diperlukan fasilitas pelatihan yang memadai baik instruktur, materi, sarana dan prasarannya agar tercipta tenaga kerja yang siap menghadapi perubahan;
2. Perkembangan sosial dan ekonomi yang pesat juga berdampak negatif pada perubahan iklim, diperlukan upaya untuk mengatasi krisis iklim disamping tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pekerjaan ramah lingkungan dengan tenaga kerja hijau merupakan salah satu upaya mengatasi hal tersebut;

3. Meningkatnya pekerja informal menuntut perlindungan hukum dan kesejahteraan yang lebih baik, penguatan sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial sangat dibutuhkan untuk menjamin hak-hak pekerja baik formal maupun informal;
4. Adanya kemajuan di segala bidang, tidak terkecuali menuntut transformasi transmigrasi di masa mendatang, tidak hanya pada sektor pertanian tetapi juga peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan lain-lain, dengan mengirim tenaga kerja yang terdidik dan terlatih pada pekerjaan kolektif sehingga menghasilkan produk dengan skala lebih besar dan kesejahteraan yang merata.
5. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
BAB I Pendahuluan	1
1.1 <i>Cascading</i> Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	3
1.3 Isu-Isu Strategis	4
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	7
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023	10
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	11
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	11
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	13
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	25
BAB III Akuntabilitas Kinerja	27
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	27
3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah	28
3.1.2 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	30
3.1.3 Sasaran 2 Meningkatnya Kesempatan Kerja	38
3.1.4 Sasaran 3 Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan	40
3.1.5 Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	46
3.1.6 Sasaran 5 Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat melalui Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat	51
3.2 Capaian Kinerja Lainnya	54
3.2.1 Capaian SDG's	54
3.2.2 Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	55
3.2.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan APBN	57
3.2.4 Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Tujuan, Sasaran Pemda DIY dan Program Pemda	58

3.3 Efisiensi Anggaran	62
3.4 Inovasi	64
3.5 Lintas Sektor	64
BAB IV Penutup	68
LAMPIRAN	69

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan kompetensi	7
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	8
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2024	9
Tabel I.4	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	10
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY 2022-2027	12
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	13
Tabel II.3	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	14
Tabel II.4.1	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024	20
Tabel II.4.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024	22
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan kinerja Tujuan	28
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024	29
Tabel III.5	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	30
Tabel III.6	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	30
Tabel III.7	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1.....	31
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	38
Tabel III.9	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	38
Tabel III.10	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	39
Tabel III.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	41
Tabel III.12	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	42
Tabel III.13	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3.....	43
Tabel III.14	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	46
Tabel III.15	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	47
Tabel III.16	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 4	47
Tabel III.17	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	51
Tabel III.18	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	52
Tabel III.19	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 5	52
Tabel III.20	Capaian SDGs	54

Tabel III.21	Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	56
Tabel III.22	Capaian Kinerja Pelaksanaan APBN	57
Tabel III.23	Kontribusi Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap capaian tujuan Pemerintah Daerah	58
Tabel III.24	Kontribusi Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap capaian Sasaran Pemerintah Daerah	58
Tabel III.25	Kontribusi Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap capaian Program Pemerintah Daerah	60
Tabel III.26	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024	63
Tabel III.27	Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	65

Daftar Gambar

Gambar I.1	<i>Cascading</i> Kinerja	2
Gambar I.2	Struktur Organisasi	3
Gambar II.1	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	25
Gambar II.2	Aplikasi Layanan Pengaduan SASADHARA	25
Gambar II.3	Aplikasi e-MAKARTI	26
Gambar III.1	Kegiatan Seleksi Magang Jepang dan Pelatihan MTU Elektro	34
Gambar III.2	Pelaksanaan Padat Karya dan Sertifikasi Uji Kompetensi Desain Grafis	35
Gambar III.3	Sosialisasi Inovasi Layanan Publik	37
Gambar III.4	Sosialisasi Karirhub dan Pelaksanaan Padat Karya	41
Gambar III.5	Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	45
Gambar III.6	Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan di Perusahaan	46
Gambar III.7	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Fasilitasi Ruang Rapat Mediasi Pekerja	51
Gambar III.8	Pembekalan dan Pemberangkatan Calon transmigrasi	53
Gambar III.9	Sertifikat Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	56

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM,*
5. *Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

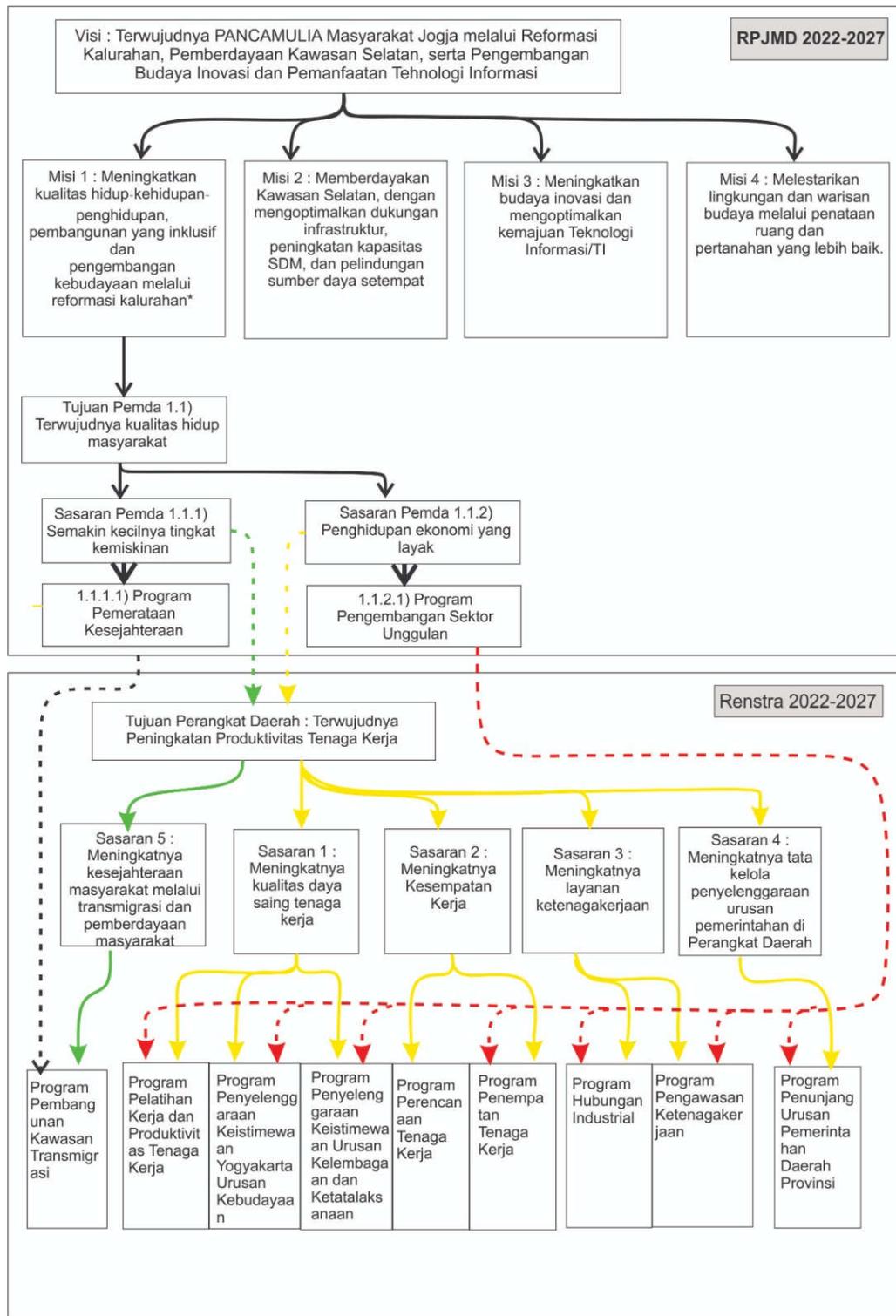
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah*

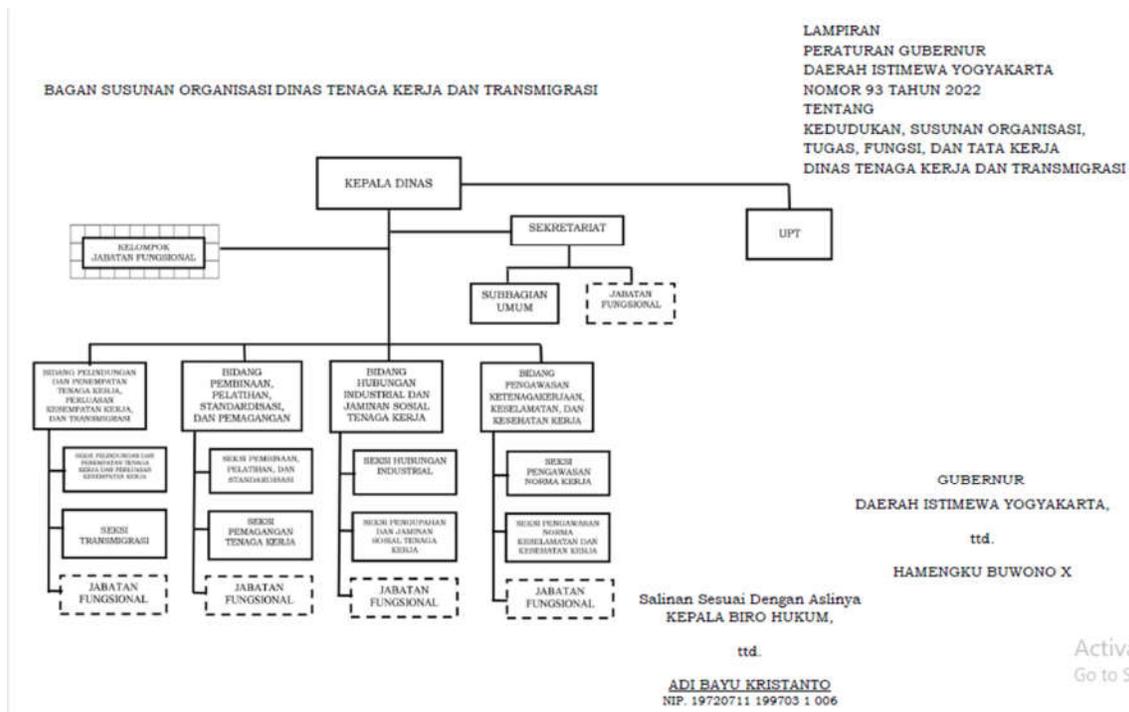
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja



Sumber: RPJMD 2022-2027, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022-2027

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
3. pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan kluster kompetensi;
4. pelaksanaan pelatihan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja dan keselamatan kerja;
5. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, dan tempat uji kompetensi;
6. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi serta pengukuran dan konsultasi produktivitas;
7. pelaksanaan dan pembinaan program pemagangan dalam dan luar negeri;
8. penciptaan dan pembinaan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja;
9. perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan sesudah bekerja;

10. pengelolaan penempatan tenaga kerja dan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja;
11. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial;
12. pembinaan pengupahan dan penyiapan penetapan upah minimum;
13. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
14. pelaksanaan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja;
15. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
16. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
17. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
18. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
19. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
20. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

1.3. Isu-Isu Strategis

Pembangunan ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari pembangunan nasional yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan baik daerah maupun nasional.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi lahan yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, dengan berbagai program pelatihan ketrampilan/kejuruan antara lain : perhotelan, pariwisata, komputer, otomotif, kebandarudaraan dan sebagainya di samping Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Daerah DIY maupun kabupaten.

a. Kondisi Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya adalah tingginya angka pengangguran dan setengah penganggur, kualitas tenaga kerja yang rendah dan terbatasnya kesempatan kerja. Penganggur adalah golongan angkatan kerja yang benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki ketrampilan dan kompetensi sesuai dengan permintaan pasar kerja. Setengah penganggur yang menjadi permasalahan adalah setengah penganggur terpaksa yaitu golongan angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan tambahan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Kualitas tenaga kerja yang masih rendah disebabkan karena kurangnya ketrampilan, kompetensi dan karakter *fighting spirit*/daya juang, sedangkan terbatasnya kesempatan kerja lebih pada tidak seimbangnya pertumbuhan kesempatan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan kebijakan lintas sektor yang lebih konkret yang melibatkan baik dari pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Tenaga Kerja Daerah, diharapkan kebijakan sektoral berdampak pada perluasan kesempatan kerja. Di samping itu, yang telah dilakukan dan perlu ditingkatkan secara terus menerus adalah peningkatan kualitas kompetensi pencari kerja melalui lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta, optimalisasi perantaraan kerja dan penciptaan kesempatan kerja baik di dalam hubungan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara serta perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja (wirausaha).

Untuk mengakselerasi upaya tersebut di atas, peran Teknologi Informasi sangat dibutuhkan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan ini adalah program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja.

b. Kondisi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Hubungan Industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Dengan demikian hubungan industrial harus diciptakan agar aman, harmonis, serasi

dan sejalan sehingga perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya guna meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Namun demikian kondisi di lapangan masih banyak dijumpai adanya hubungan industrial yang tidak harmonis dan berujung adanya perselisihan ketenagakerjaan di perusahaan. Tenaga kerja sering berada pada posisi yang lemah ketika terjadi perselisihan, sehingga perlu dilakukan upaya mediasi oleh mediator hubungan industrial untuk menjembatani terwujudnya prinsip *“win-win solution”* di dalam Perjanjian Bersama antara pihak yang berselisih yaitu pemberi kerja dan tenaga kerja. Pembinaan rutin dan berkelanjutan oleh Mediator Hubungan Industrial di provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dilakukan baik kepada pekerja/buruh/Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun pengusaha.

Perlindungan terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Implementasi norma kerja dan norma K3 masih banyak mengalami kendala, hal ini disebabkan karena masih rendahnya komitmen perusahaan, keterlibatan pekerja/buruh masih rendah dan terbatasnya akses bagi pekerja/buruh untuk memberikan masukan kepada perusahaan terkait pemenuhan hak norma kerja dan norma K3. Untuk itu diperlukan peran penguji lingkungan kerja dan pengawas ketenagakerjaan melalui upaya *Preventive Educative, Repressive Non Justicia dan Repressive Justicia*.

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan.

c. Kondisi Ketransmigrasian

Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan ini sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama pembangunan ekonomi di kawasan desa yang masih terisolasi atau tertinggal. Program transmigrasi di Indonesia yang telah berjalan selama ini telah mengalami perubahan regulasi menyesuaikan perkembangannya. Semula program transmigrasi berorientasi pada perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain yang kepadatan pendudukannya masih rendah. Tetapi saat ini telah mengalami perubahan paradigma yaitu adanya revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru menuju transmigrasi di era digital 4.0. Revitalisasi kawasan

transmigrasi ini untuk lebih menyejahterakan para transmigran, selain itu dapat memberikan dampak positif bagi wilayah di sekitar kawasan transmigrasi.

Perubahan paradigma tersebut di atas harus dibarengi dengan penyiapan calon transmigran yang lebih berkualitas, dibekali dengan pelatihan berbasis kompetensi yang mampu membangun kawasan transmigrasi menjadi daerah yang lebih produktif, berdaya saing, maju dan menjadi lumbung-lumbung pangan guna menyukseskan Program Ketahanan Pangan Nasional (*Food Estate*). Dengan demikian program transmigrasi memiliki nilai yang strategis, transmigran produktif, kreatif dan sejahtera merupakan tujuan diselenggarakannya program transmigrasi yang dapat berdampak pada masyarakat sekitarnya. Namun demikian dalam perjalanannya masih sering dijumpai permasalahan diantaranya tidak dipenuhinya hak-hak transmigran sebagaimana diatur dalam Kerja Sama Antar Daerah seperti hak tanah, fasilitas Rumah Tangga dan Jamban Keluarga serta fasilitas umum. Sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tujuan. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penyelenggaraan transmigrasi adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

a. Dukungan sumber daya manusia sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No.	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada						Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1	0
B.	Jabatan Administrasi													
	Administrator	7	7				7	7					3	4
	Pengawas	12		12			16	12	4				5	11
	Pelaksana	94		77	17		49	3	26	7	12	1	23	26
C.	Jabatan Fungsional	99		96	3		79	22	51	6			40	39
	Jumlah	213	8	185	20		152	45	81	13	12	1	72	80

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 81 orang (53,29%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 45 orang (29,61%), D3 13 orang (8,55%), SLTA 12 orang (7,9%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 61 orang, terdiri dari 20 orang pejabat pelaksana substantif dan 41 pejabat pelaksana administratif.

b. Dukungan sarana prasarana sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
I	ASET TETAP		6.319	89.675.551.589,98
1	TANAH	m2	10	4.551.800.680,00
2	PERALATAN DAN MESIN	unit	4.323	39.837.907.838,98
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	m2	52	43.081.969.221,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	m	14	1.983.490.200,00
5	ASET TETAP LAINNYA	unit	1.918	41.369.050,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		2	179.014.600,00
II	ASET LAINNYA		247	1.349.566.558,00
	JUMLAH		6.566	91.025.118.147,98

Sumber: Data Neraca Dinas Nakertrans 31 Desember 2024 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

Terdapat 68 Kendaraan yang dimanfaatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, yang terdiri dari:

1. 1 Unit Kendaraan Dinas Jabatan;
2. 44 Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua, yang tercatat di Induk sejumlah 30 unit, tercatat di BLKPP sejumlah 6 unit, tercatat di Balai K3 sejumlah 8 unit;
3. 23 Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat, yang tercatat di Induk sejumlah 12 unit, tercatat di BLKPP sejumlah 4 unit, tercatat di Balai K3 sejumlah 7 unit.

Kebutuhan ruangan kantor secara umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang,

ruang tunggu, ruang layanan umum dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa (meja, kursi, lemari, *filing cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan peralatan perlengkapan kantor lainnya sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer/laptop* dengan kondisi baik dan dapat dipakai dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana kantor dapat dikatakan sudah memenuhi.

Selain sarana dan prasarana terkait kinerja pegawai, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mewujudkan pengarusutamaan gender (PUG) telah menyediakan fasilitas ruang laktasi, ruang ramah anak, mushola dengan tempat wudhu terpisah, toilet terpisah dan toilet disabilitas, kursi roda, RAM, ruang pelayanan khusus serta lapangan untuk berolahraga, yang bisa dimanfaatkan baik intern pegawai maupun masyarakat.

c. Dukungan Anggaran tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp2,213,961,000,00	Rp2,085,811,000,00	(Rp128,150,000,00)	(6,14)
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp1,997,961,000,00	Rp1,869,811,000,00	(Rp128,150,000,00)	(6,35)
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp216,000,000,00	Rp216,000,000,00	Rp0,00	0,00
5 1	BELANJA OPERASI	Rp77,869,994,044,00	Rp74,994,047,908,00	(Rp2,875,946,136,00)	(3,63)
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp29,357,156,694,00	Rp28,562,504,368,00	(Rp794,651,706,00)	(2,76)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp40,199,113,350,00	Rp37,483,798,920,00	(Rp2,715,314,430,00)	(7,24)
5 1 05	Belanja Hibah	Rp8,313,724,000,00	Rp8,947,744,000,00	Rp634,020,000,00	7,09
5 2	BELANJA MODAL	Rp51,546,200,00	Rp373,612,000,00	Rp322,065,800,00	94,71
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp51,546,200,00	Rp373,612,000,00	Rp322,065,800,00	94,71

Sumber data: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY semula Rp77.869.994.044,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp74.994.047.908,00 atau berkurang Rp2.875.946.138,00. Perubahan anggaran Tahun 2024 merupakan cerminan dukungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Meningkatkan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja tidak hanya pada level <i>output</i> yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada <i>outcome</i> yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian khususnya pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Hubungan industrial, Program Pengawasan Ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY yaitu meningkatnya kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Bersedia meningkatkan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja tidak hanya pada level <i>output</i> yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada <i>outcome</i> yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian khususnya pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Hubungan industrial, Program Pengawasan Ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY yaitu meningkatnya kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat
2	Mempertahankan kinerja yang sudah baik, yang selama ini telah diterapkan, sehingga kedepannya hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih baik lagi	Bersedia mempertahankan kinerja yang sudah baik, yang selama ini telah diterapkan, sehingga kedepannya hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih baik lagi
3	Meningkatkan layanan ketenagakerjaan kepada masyarakat dengan pemanfaatan media sosial berbasis Teknologi Informatika (TI) guna percepatan komunikasi, informasi, sosialisasi dan edukasi ketenagakerjaan di wilayah DIY	Bersedia meningkatkan layanan ketenagakerjaan kepada masyarakat dengan pemanfaatan media sosial berbasis Teknologi Informatika (TI) guna percepatan komunikasi, informasi, sosialisasi dan edukasi ketenagakerjaan di wilayah DIY

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level tujuan Perangkat Daerah, sasaran strategis Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja *output* dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu tahun 2024. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran Pemerintah Daerah yaitu “Semakin kecilnya tingkat kemiskinan” dan “Penghidupan ekonomi yang layak”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja”

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam waktu lima tahun dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DIY, 2022-2027**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Target Tahunan					Target Akhir Resntra
					2023	2024	2025	2026	2027	
A	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas DIY	Juta/Tenaga Kerja	50,38	51,93	54,09	56,37	58,78	61,19	61,19
1	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	75	n/a	75	75	75	75	75
2		Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	%	n/a	n/a	65	70	75	80	80
3		Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	Orang	990	1020	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	%	63,53	n/a	67,50	70	72,50	75	75
5		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	Orang	11.000	11.100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Meningkatnya layanan ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PPI PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan	2.609	n/a	2.629	2.639	2.649	2659	2.659
7		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	Perusahaan	2.708	n/a	2.748	2.768	2.788	2808	2.808
8		Jumlah layanan sarana HI,serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3	Layanan	3.300	3.441	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	A	A	A	A	A	A
10	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	%	n/a	90	90	90	90	90	90

Sumber : Renstra 2022-2027

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	1.1 Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi	1.1.1 Peningkatan Pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi dan kebutuhan pasar kerja serta pengembangan produktivitas tenaga kerja 1.1.2 Peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan yang berorientasi penempatan 1.1.3 Peningkatan jumlah angkatan kerja yang kompeten
		1.2 Pengembangan produktivitas yang berorientasi pada peningkatan jumlah perusahaan dengan kriteria baik dan tenaga kerja dengan produktivitas di atas standar	1.2.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas pengukuran produktivitas perusahaan dan tenaga kerja 1.2.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas bimbingan konsultasi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan
		1.3 Pembangunan karakter angkatan kerja	1.3.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas angkatan kerja yang memahami karakter dan budaya kerja sesuai nilai-nilai semangat keyogyakartaan
	2. Terwujudnya Kesempatan Kerja	2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penempatan	2.1.1 Peningkatan akses angkatan kerja kepada dunia kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK), penyuluhan bimbingan dan jabatan serta perantaraan kerja. 2.1.2 Fasilitasi Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan).
		2.2 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Perluasan tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat	2.2.1 Perluasan kesempatan kerja yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja di sektor informal
		2.3 Meningkatkan pembinaan penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten/Kota	2.3.1 Pembinaan dan pendampingan penyusunan RTK Kab/Kota
	3. Meningkatnya layanan ketenagakerjaan	3.1 Meningkatkan Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dan Perbaiki iklim ketenagakerjaan	3.1.1 Peningkatan dan deteksi dini hubungan industrial 3.1.2 Peningkatan kapasitas Serikat Pekerja dan Pengusaha melalui pelatihan, sosialisasi dan penguatan kelembagaan 3.1.3 Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui penerapan sistem pengupahan yang adil dan program perlindungan sosial bagi pekerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.2 Meningkatkan kualitas pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	3.2.1 Peningkatan pelayanan norma kerja dan norma K3 3.2.2 Peningkatan Pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan norma kerja dan norma K3 3.2.3 Peningkatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk perusahaan dan tempat kerja 3.2.4 Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui perbaikan kesehatan kerja
	4. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dengan pemberdayaan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat miskin	4.1 Meningkatkan kualitas calon transmigran 4.2 Meningkatkan kuantitas alokasi penempatan 4.3 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin untuk dapat membuka usaha	4.1.1 Peningkatan kualitas pelatihan calon transmigran sesuai kebutuhan daerah tujuan 4.2.1 Peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah tujuan 4.3.1 Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembekalan kewirausahaan
	5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	5.1 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	5.1.1 Peningkatan pelayanan <i>public</i> 5.1.2 Penataan arsip yang baik dan benar 5.1.3 Pengelolaan aset secara tepat 5.1.4 Penataan kepegawaian sesuai kualifikasi dan kompetensi 5.1.5 Pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif dan tepat waktu 5.1.6 Perencanaan, monitoring dan evaluasi yang efektif dan tepat waktu

Sumber : Renstra 2022-2027

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2024 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	Ket.
Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja					
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	1.1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	39.850.000	39.850.000	0	Dinas
		24.840.257.150	23.118.790.750	-1.721.466.400	BLKPP
		214.160.000	648.380.000	434.220.000	Balai K3
	1.1.1 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	30.050.000	30.050.000	0	Dinas
		24.790.257.150	23.068.790.750	-1.721.466.400	BLKPP
		214.160.000	648.380.000	434.220.000	Balai K3

Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/berkurang (Rp)	Ket.	
	1.1.1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	30.050.000	30.050.000	0	Dinas	
		24.778.757.950	23.057.291.550	-1.721.466.400	BLKPP	
		214.160.000	648.380.000	434.220.000	Balai K3	
	1.1.1.2 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	11.499.200	11.499.200	0	BLKPP	
	1.1.2 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	9.800.000	9.800.000	0	Dinas	
	1.1.2.1 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	9.800.000	9.800.000	0	Dinas	
	1.1.3 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	0	BLKPP	
	1.1.3.1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	50.000.000	0	BLKPP	
	1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		15.241.923.000	15.304.890.000	62.967.000	Dinas
			722.065.600	722.065.600	0	BLKPP
	1.2.1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		15.241.923.000	15.304.890.000	62.967.000	Dinas
			722.065.600	722.065.600	0	BLKPP
	1.2.1.1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		3.680.048.000	3.827.215.000	147.167.000	Dinas
	1.2.1.2 Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa		11.561.875.000	11.477.675.000	-84.200.000	Dinas
	1.2.1.3 Pengembangan Kewirausahaan Desa		722.065.600	722.065.600	0	BLKPP
	1.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		81.600.000	81.600.000	0	BLKPP
1.3.1 Peningkatan Budaya Pemerintahan		81.600.000	81.600.000	0	BLKPP	
1.3.1.1 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY		81.600.000	81.600.000	0	BLKPP	
Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1		41.139.855.750	39.915.576.350			
Sasaran 2. Meningkatnya Kesempatan Kerja	2.1 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	10.000.000	10.000.000	0	Dinas	
	2.1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	10.000.000	10.000.000	0	Dinas	
	2.1.1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	10.000.000	10.000.000	0	Dinas	
	2.2 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	61.969.000	61.969.000	0	Dinas	
	2.2.1 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48.752.000	48.752.000	0	Dinas	
	2.2.1.1 Pelayanan Antar Kerja	21.036.500	21.036.500	0	Dinas	
	2.2.1.2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	4.702.000	4.702.000	0	Dinas	

Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/berkurang (Rp)	Ket.
	2.2.1.3 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	7.275.000	7.275.000	0	Dinas
	2.2.1.4 Perluasan Kesempatan Kerja	15.738.500	15.738.500	0	Dinas
	2.2.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	7.843.000	7.843.000	0	Dinas
	2.2.2.1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4.330.200	4.330.200	0	Dinas
	2.2.2.2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	3.512.800	3.512.800	0	Dinas
	2.2.3 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	5.374.000	5.374.000	0	Dinas
	2.2.3.1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	5.374.000	5.374.000	0	Dinas
Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 2		71.969.000	71.969.000	0	
Sasaran 3. Meningkatnya layanan ketenagakerjaan	3.1 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	314.100.000	314.100.000	0	Dinas
	3.1.1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	162.500.000	162.500.000	0	Dinas
	3.1.1.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	0	Dinas
	3.1.1.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	10.000.000	10.000.000	0	Dinas
	3.1.1.3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	50.000.000	50.000.000	0	Dinas
	3.1.1.4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	0	Dinas
	3.1.1.5 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	2.500.000	2.500.000	0	Dinas
	3.1.2 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	151.600.000	151.600.000	0	Dinas

Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/berkurang (Rp)	Ket.	
	3.1.2.1 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	50.900.000	50.900.000	0	Dinas	
	3.1.2.2 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100.700.000	100.700.000	0	Dinas	
	3.2 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	308.875.000	308.875.000	0	Dinas	
		384.240.500	384.240.500	0	Balai K3	
	3.2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	308.875.000	308.875.000	0	Dinas	
		384.240.500	384.240.500	0	Balai K3	
	3.2.1.1 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	308.875.000	308.875.000	0	Dinas	
	3.2.1.2 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	384.240.500	384.240.500	0	Balai K3	
Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 3		1.007.215.500	1.007.215.500			
Sasaran 4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	4.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.379.044.594	31.644.423.458	-734.621.136	Dinas	
		2.098.536.300	2.099.406.300	870.000	BLKPP	
		1.024.919.100	1.029.939.300	5.020.200	Balai K3	
		4.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	65.000.000	0	Dinas
		4.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	0	Dinas
		4.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	20.000.000	0	Dinas
		4.1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	0	Dinas
		4.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.285.196.694	28.490.544.988	-794.651.706	Dinas
			39.570.000	39.570.000	0	BLKPP
			34.170.000	34.170.000	0	Balai K3
		4.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.199.836.694	28.405.184.988	-794.651.706	Dinas
		4.1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.860.000	62.860.000	0	Dinas
			39.570.000	39.570.000	0	BLKPP
			34.170.000	34.170.000	0	Balai K3
		4.1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	7.500.000	0	Dinas
		4.1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	0	Dinas
		4.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.475.000	35.475.000	-15.000.000	Dinas
			13.500.000	13.500.000	0	BLKPP
			10.620.000	10.620.000	0	Balai K3
		4.1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30.000.000	15.000.000	-15.000.000	Dinas
	4.1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.475.000	20.475.000	0	Dinas	
		13.500.000	13.500.000	0	BLKPP	
		10.620.000	10.620.000	0	Balai K3	

Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/berkurang (Rp)	Ket.
	4.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.681.700	15.681.700	0	Dinas
	4.1.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.681.700	15.681.700	0	Dinas
	4.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.499.800	301.281.800	52.782.000	Dinas
		76.620.700	76.620.700	0	BLKPP
		58.187.100	58.099.100	-88.000	Balai K3
	4.1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.982.000	23.982.000	0	Dinas
		10.000.000	10.000.000	0	BLKPP
		10.000.000	10.000.000	0	Balai K3
	4.1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.853.600	62.853.600	0	Dinas
		21.102.800	21.102.800	0	BLKPP
		10.397.700	10.397.700	0	Balai K3
	4.1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.987.300	14.987.300	0	Dinas
		11.998.000	11.998.000	0	BLKPP
		9.548.400	9.548.400	0	Balai K3
	4.1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.973.900	26.973.900	0	Dinas
		15.999.900	15.999.900	0	BLKPP
		9.000.000	9.000.000	0	Balai K3
	4.1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.125.000	1.125.000	0	Dinas
		1.199.000	1.199.000	0	BLKPP
		1.200.000	1.200.000	0	Balai K3
	4.1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.578.000	171.360.000	52.782.000	Dinas
		16.321.000	16.321.000	0	BLKPP
		18.041.000	17.953.000	-88.000	Balai K3
	4.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	15.000.000	0	Dinas
		11.554.000	11.554.000	0	Balai K3
	4.1.6.1 Pengadaan Mebel	2.900.000	2.900.000	0	Dinas
		2.900.000	2.900.000	0	Balai K3
	4.1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	6.500.000	0	Dinas
		2.867.000	2.867.000	0	Balai K3
	4.1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.600.000	5.600.000	0	Dinas
		5.787.000	5.787.000	0	Balai K3
	4.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.079.384.400	2.067.384.400	-12.000.000	Dinas
		1.688.348.300	1.688.348.300	0	BLKPP
		746.186.000	747.286.000	1.100.000	Balai K3
	4.1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.240.000	6.240.000	0	Dinas
		1.755.000	1.755.000	0	BLKPP
		1.765.000	1.765.000	0	Balai K3
	4.1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	492.798.400	480.798.400	-12.000.000	Dinas
		215.499.300	215.499.300	0	BLKPP
		121.146.000	122.246.000	1.100.000	Balai K3
	4.1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.580.346.000	1.580.346.000	0	Dinas
		1.471.094.000	1.471.094.000	0	BLKPP

Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/berkurang (Rp)	Ket.
		623.275.000	623.275.000	0	Balai K3
	4.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.807.000	654.055.570	34.248.570	Dinas
		280.497.300	280.497.300	0	BLKPP
		164.202.000	168.210.200	4.008.200	Balai K3
	4.1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.085.200	29.085.200	0	Dinas
	4.1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.291.800	281.291.800	0	Dinas
		109.730.300	109.730.300	0	BLKPP
		99.138.000	102.146.200	3.008.200	Balai K3
	4.1.8.3 Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.000.000	0	Dinas
		300.000	300.000	0	BLKPP
	4.1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.840.000	54.840.000	0	Dinas
		29.968.000	29.968.000	0	BLKPP
		55.110.000	55.110.000	0	Balai K3
	4.1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	243.070.000	250.204.820	7.134.820	Dinas
		132.000.000	132.000.000	0	BLKPP
	4.1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.520.000	37.633.750	27.113.750	Dinas
		8.499.000	8.499.000	0	BLKPP
		9954000	10.954.000	1.000.000	Balai K3
Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 4		35.502.499.994	34.773.769.058		
Sasaran 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200.000.000	200.000.000	0	Dinas
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	200.000.000	200.000.000	0	Dinas
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	58.755.000	58.755.000	0	Dinas
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	141.245.000	141.245.000	0	Dinas
Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 5		200.000.000	200.000.000		
Total Anggaran yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024		77.921.540.244	75.968.529.908		

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas DIY	Juta rupiah/ <u>tenaga kerja</u>	54,09	Triwulan I	54,09
					Triwulan II	54,09
					Triwulan III	54,09
					Triwulan IV	54,09*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	%	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90
2	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	75	Triwulan I	13
					Triwulan II	39
					Triwulan III	66
					Triwulan IV	75
3.		Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	%	65	Triwulan I	0
					Triwulan II	20
					Triwulan III	40
					Triwulan IV	65
4.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	%	67,50	Triwulan I	10
					Triwulan II	25
					Triwulan III	45
					Triwulan IV	67,50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	<u>Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan</u>	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan	2.629	Triwulan I	2.598
					Triwulan II	2.608
					Triwulan III	2.618
					Triwulan IV	2.629
6.		Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	Perusahaan	2.748	Triwulan I	2.728
					Triwulan II	2.733
					Triwulan III	2.740
					Triwulan IV	2.748
7	<u>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah</u>	Kategori RB Perangkat Daerah	<u>Kategori</u>	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja (APBD)	Rp10.000.000,00
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD)	Rp39.850.000,00
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja (APBD)	Rp61.969.000,00
4.	Program Hubungan Industrial (APBD)	Rp314.100.000,00
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan (APBD)	Rp308.875.000,00
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp15.241.923.000,00
7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (APBD)	Rp200.000.000,00
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp.32.379.044.594,00
	Jumlah Anggaran	Rp48.555.761.594,00

Anggaran yang dikelolakan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas

No.	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD, DBHCHT)	Rp24.840.257.150,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp722.065.600,00
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dais)	Rp81.600.000,00
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp2.098.536.300,00
	Jumlah Anggaran	Rp27.742.459.050,00

Anggaran yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No.	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD)	Rp214.160.000,00
2.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan (APBD)	Rp384.240.500,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp1.024.919.100,00
	Jumlah Anggaran	Rp1.623.319.600,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi sebesar Rp4.731.260.000,00 terdiri atas :
 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Ditjen Binalavotas Rp2.697.266.000,00.
 2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Dukungan Manajemen Ditjen PPTK dan PKK Rp359.215.000,00.
 3. Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan HI dan JSTK Rp680.297.000,00
 4. Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Wasnaker dan K3 Rp388.528.000,00
 5. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp605.954.000,00.

Pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2024

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas DIY	Juta rupiah/ <u>tenaga kerja</u>	54,09	Triwulan I	54,09
					Triwulan II	54,09
					Triwulan III	54,09
					Triwulan IV	54,09*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	%	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90
2.	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	75	Triwulan I	13
					Triwulan II	39
					Triwulan III	66
					Triwulan IV	75
3.		Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	%	65	Triwulan I	0
					Triwulan II	20
					Triwulan III	40
					Triwulan IV	65
4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	%	67,50	Triwulan I	10
					Triwulan II	25
					Triwulan III	45
					Triwulan IV	67,50
5	Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan	2.629	Triwulan I	2.598
					Triwulan II	2.608
					Triwulan III	2.618
					Triwulan IV	2.629
6.		Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	Perusahaan	2.748	Triwulan I	2.728
					Triwulan II	2.733
					Triwulan III	2.740
					Triwulan IV	2.748
7	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A (91,46)	Triwulan I	A (91,46)
					Triwulan II	A (91,46)
					Triwulan III	A (91,46)
					Triwulan IV	A (91,46) *)

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja (APBD)	Rp10.000.000,00
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD)	Rp39.850.000,00
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja (APBD)	Rp61.989.000,00
4.	Program Hubungan Industrial (APBD)	Rp314.100.000,00
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan (APBD)	Rp308.875.000,00
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp15.304.890.000,00
7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (APBD)	Rp200.000.000,00
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp.31.644.423.458,00
	Jumlah Anggaran	Rp47.884.107.458,00

2. Anggaran yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas

No.	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD, DBHCHT)	Rp23.118.790.750,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp722.065.600,00
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dais)	Rp81.600.000,00
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp2.098.536.300,00
	Jumlah Anggaran	Rp26.020.992.650,00

3. Anggaran yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

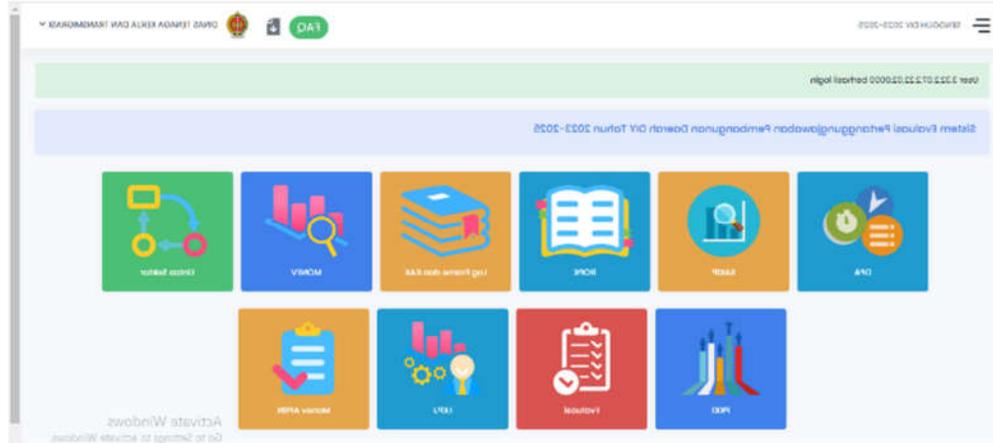
No.	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD)	Rp434.220.000,00
2.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan (APBD)	Rp384.240.500,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp1.029.939.300,00
	Jumlah Anggaran	Rp2.062.559.800,00

4. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
5. Mengelola anggaran dekonsentrasi sebesar Rp4.683.310.000,00 terdiri atas :
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Ditjen Binalavotas Rp2.697.266.000,00.
 2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Dukungan Manajemen Ditjen PPTK dan PKK Rp358.975.000,00.
 3. Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan HI dan JSTK Rp80.297.000,00
 4. Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Wasnaker dan K3 Rp388.528.000,00
 5. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp558.244.000,00.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

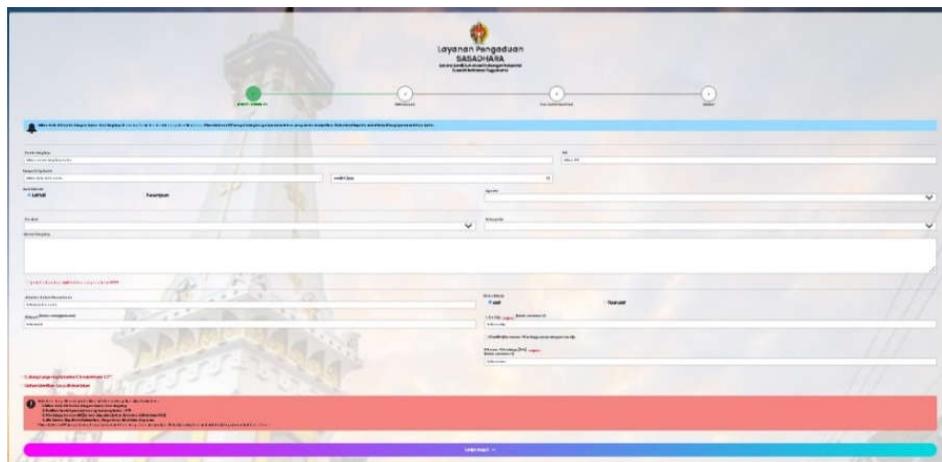
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

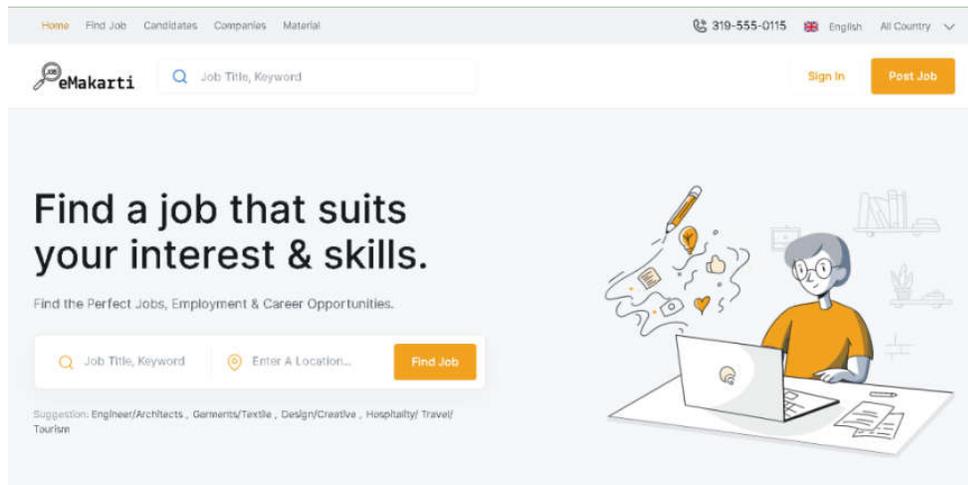
2. Instrumen pendukung Capaian Kinerja OPD adalah :
 - a. Layanan Pengaduan SASADHARA (Sarana Sawiji Advokasi Hubungan Industrial), yang memberikan kemudahan akses bagi tenaga kerja untuk menyampaikan pengaduan. Sehingga kasus-kasus ketenagakerjaan dan perselisihan hak dapat lebih cepat ditangani.

Gambar.II.2. Aplikasi Layanan Pengaduan



- b. e-MAKARTI (Sistem Asesmen, Pendampingan dan Manajemen Antar Kerja Terintegrasi), terobosan untuk menekan angka pengangguran melalui upaya strategis dan kolaboratif dalam mempersiapkan angkatan kerja unggul yang mempunyai kesiapan, kompetensi dan daya saing untuk memasuki dunia kerja, sekaligus sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan yang disebabkan oleh masih tingginya angka pengangguran, khususnya tingkat pengangguran usia muda (18 s.d. 24 tahun).

Gambar.II.3. Aplikasi e-MAKARTI



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2024
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ **Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra
						Target	Realisasi	Persentase	
A	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas DIY	Juta/Tenaga Kerja	50,38	55,44	54,09	57,08	105,53	61,19
1	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	75	n/a	75	75	100	75
2		Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	%	n/a	n/a	65	68	104,62	80
3		Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	Orang	990	1116	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Bareline 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024				Target Akhir Renstra
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode	
4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	%	63,53	n/a	67,50	87	128,89		75
5		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	Orang	11.000	13.452	n/a	n/a	n/a		n/a
6	Meningkatnya layanan ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan	2.609	n/a	2.629	2.630	100,04		2.659
7		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	Perusahaan	2.708	n/a	2.748	2.750	100,07		2.808
8		Jumlah layanan sarana HI,serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3	Layanan	3.300	3.534	n/a	n/a	n/a		n/a
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	A	A	A	100		A
10	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	%	n/a	90	90	100	111,11		90

Sumber : sungguh.jogjaprovo.go.id

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas DIY	PDRB dibagi penduduk yang bekerja (Data BPS pada tahun-n)

Sumber Data : *Renstra Disnakertrans 2022-2027*

Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
	Tingkat Produktivitas DIY <u>Meta Indikator</u> PDRB dibagi penduduk yang bekerja (Data BPS pada tahun-n)	55.44 juta rupiah/tenaga kerja	54.09 juta rupiah/tenaga kerja	57.08 juta rupiah/tenaga kerja (124.590.449/2.182.770 /sumber data : BPS tahun 2024)	105.53 % (57.08/54.09/sumber data : sengguh.jogjapro.gov.go.id)	61.19 juta rupiah/ tenaga kerja	93.28% (57.08/61.19 x 100)

Sumber : sengguh.jogjapro.gov.go.id

Analisis Ketercapaian Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 57,08 juta rupiah/tenaga kerja, dihitung dari PDRB (atas dasar harga konstan) dibagi penduduk yang bekerja = $124.590.449 : 2.182.770 = 57,08$ juta/tenaga kerja. PDRB tahun berjalan berdasar data Pertumbuhan ekonomi BPS Februari 2025, penduduk yang bekerja berdasar data Sakernas BPS Agustus 2024, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 105,53% (terlampau).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 55,44, terdapat kenaikan sebesar 1,64.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 93,28%

Faktor Pendukung keberhasilan :

Penduduk DIY didominasi penduduk usia kerja di mana 74.78%nya merupakan angkatan kerja, sehingga ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung produktivitas cukup besar.

Faktor Penghambat keberhasilan :

Masih terdapat *mismatch* antara kompetensi tenaga kerja dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, apabila *mismatch* dapat diatasi produktivitas tenaga kerja semakin meningkat

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 5 (lima) Sasaran, yakni:

1. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja;
2. Meningkatnya Kesempatan Kerja;
3. Meningkatnya layanan ketenagakerjaan;
4. Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah;
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat.

3.1.2 Sasaran 1: Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja diukur dengan 2 (dua) indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	Jumlah peserta pelatihan yang dapat ditempatkan di sektor formal dan berwirausaha dibagi dengan peserta pelatihan dikali 100%
		Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	Jumlah perusahaan yang diukur dengan hasil produktivitas baik (perusahaan memiliki 1. perencanaan strategis, 2. fokus pada pengembangan dan manajemen SDM, 3. Data, informasi dan analisis, 4. manajemen proses dan 5. hasil usaha) dibagi jumlah perusahaan yang diukur produktivitasnya dikali 100% Data : Disnakertrans dihitung secara kumulatif

Sumber : sungguh.jogjaprov.go.id

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi *		
1	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	n/a	75 %	75 % (1.667/2.219) x 100%	100 % (75/75 x 100%)	75 %	100 % (75/75 x 100%).
2	Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	n/a	65 %	68 % (49/72) x 100%	104,62 (68/65) x 100%	80%	85% (68/80) x 100%

Sumber : sungguh.jogjaprov.go.id

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja pada kedua indikator adalah sebagai berikut:

- 1). Indikator : Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan
 - a. Tercapai 75% diperoleh dari 1667 jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan (dari sertifikasi uji kompetensi 132 orang, pemagangan 235 orang, sektor formal 249 orang dan berwirausaha 1051 orang) dibagi jumlah peserta pelatihan sebanyak 2219 orang (sertifikasi 200 orang, magang 319 dan pelatihan ketrampilan 1.700 orang) dikali 100%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100% (tercapai).
 - b. Tidak bisa dibandingkan realisasi tahun lalu karena 2023 belum ada target.
 - c. Capaian target indikator tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 100%.
- 2). Indikator : Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik
 - a. Tercapai 68% diperoleh dari 72 perusahaan yang mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas dan pengukuran produktivitas, ada 49 perusahaan dengan hasil produktivitas baik (perusahaan memiliki 1. perencanaan strategis, 2. fokus pada pengembangan dan manajemen SDM, 3. Data, informasi dan analisis, 4. manajemen proses dan 5. hasil usaha) dikali 100%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100% (terlampau).
 - b. Tidak bisa dibandingkan realisasi tahun lalu karena 2023 belum ada target.
 - c. Capaian target indikator tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 85%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan 2 (dua) Indikator tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.7 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	80	95.5	119.38
		Persentase peserta magang yang ditempatkan	60	74	123.33
		Persentase peserta pelatihan yang terampil	95	98	103,16
		Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi	100	100	100%
		Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya di atas standar	90	100	111.11%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n_dinas	20 Orang	29 Orang	145%
		BLKPP	1940 Orang	1900 Orang	98%
		BK3	150 Orang	150 Orang	100%
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja_BLKPP	3 Unit	3 Unit	100%
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				
	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	103 LPK	103 LPK	100%
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi				
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya saing Tenaga Kerja Tingkat Daerah_BLKPP	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja	100	100	100
		Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	80	95.5	119.38
		Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	100	100	100
		Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan	31	37	119.35
		Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja di kawasan selatan	70	100	142,86%
		Persentase penumbuhan calon wirausaha baru	70	83	118.57%
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi	2 Laporan	2 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya_BLKPP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	40	40	100%
	Peningkatan Budaya Pemerintahan				
	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY_BLKPP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sumber : sungguh.jogjaprovo.go.id

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 1) Indikator Program : Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten, Target 80% tercapai 95,5% (113,89%), didukung oleh keberhasilan pelaksanaan aktivitas kegiatan Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja, dari 10 angkatan uji kompetensi sebanyak 200 peserta terdapat 191 peserta yang lulus kompeten dan sub kegiatan Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja.
- 2) Indikator Program : Persentase peserta magang yang ditempatkan Target 60% tercapai 74% (123,33%), capaian didukung keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, di mana jumlah peserta magang yang ditempatkan sebanyak 74 orang dari jumlah peserta magang 100 orang.
- 3) Indikator Program : Persentase peserta pelatihan yang terampil Target 95% tercapai 98% (103,16%), capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (BLKPP), dari 1976 peserta pelatihan berbasis kompetensi terdapat 1936 peserta yang lulus bersertifikat minimal nilai baik dan sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja.
- 4) Indikator Program : Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Target 100% tercapai 100% (100%), capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi di mana 150 orang yang dilatih seluruhnya tersertifikasi.

- 5) Indikator Program : Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya di atas standar

Target 90% tercapai 100% (111,11%), didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja di BLKPP.

Gambar III.1 Kegiatan Seleksi Magang Jepang dan Pelatihan MTU Elektro



b. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

- 1) Indikator Program : Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja,

Target 100% tercapai 100% (100%), capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya aktivitas Sosialisasi Budaya Kerja Istimewa bagi Pekerja, dari 100 pekerja yang ditargetkan mengikuti sosialisasi dapat terpenuhi.

- 2) Indikator Program : Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten

Target 80% tercapai 95,5% (113,89%), capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya aktivitas Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja, dari 10 angkatan uji kompetensi sebanyak 200 peserta terdapat 191 peserta yang lulus kompeten.

- 3) Indikator Program : Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi

Target 100% tercapai 100% (100%), capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk

Pemberdayaan Ekonomi Desa, dari usulan sejumlah 171 lokasi seluruhnya dapat difasilitasi untuk pelaksanaan Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta.

- 4) Indikator Program : Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan

Target 31% tercapai 37% (119,37%), capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya aktivitas Bimtek Struktur dan Skala Upah dari 180 perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis ada 67 perusahaan yang sudah Menyusun struktur dan skala upah.

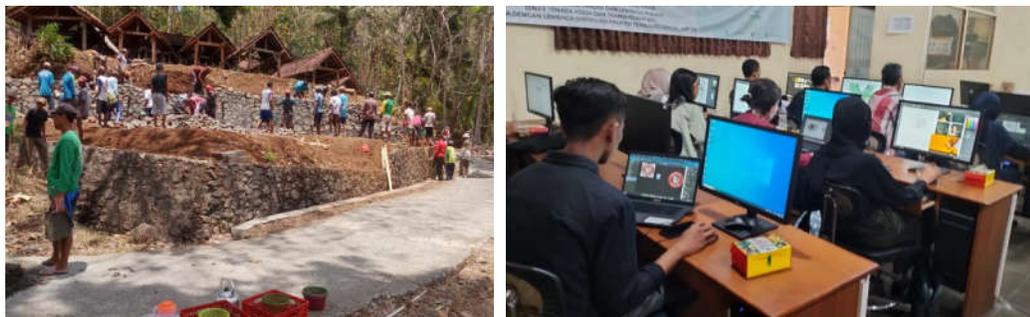
- 5) Indikator Program : Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja di kawasan selatan

Target 70% tercapai 100% (142,86%), capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya aktivitas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Wilayah Selatan di Balai K3, dari 150 orang peserta seluruhnya telah dilakukan pemeriksaan *ergonomic* dan kelelahan kerja.

- 6) Indikator Program : Persentase penumbuhan calon wirausaha baru

Target 70% tercapai 83% (118,57%), capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Desa di BLKPP, di mana ada 5 kelompok (100 orang) yang memulai usaha dibagi 6 kelompok (120 orang) yang mengikuti pelatihan kewirausahaan.

Gambar III.2 Pelaksanaan Padat Karya dan Sertifikasi Uji Kompetensi Desain Grafis



Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial budaya dengan target 7 dokumen terdapat aktivitas kegiatan sebagai berikut:

- 1). Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja Istimewa, dengan sub aktivitas berikut:
 - Sertifikasi Uji Kompetensi
 - Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
 - Peningkatan *Softskill* Angkatan Kerja Khusus Penyandang Disabilitas
 - Pengembangan dan Sosialisasi Aplikasi eMakarti
- 2). Implementasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa;
- 3). Internalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- 4). Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui Budaya Kerja Istimewa, sub aktivitas :
 - Bimtek Struktur dan Skala Upah
 - Bimtek Hubungan Industrial bagi Organisasi Pekerja/Buruh
 - Bimtek Norma Kerja Perempuan dan Anak
 - *Mayday*-Sarasehan dan Pertandingan Olahraga
 - Sosialisasi Norma Kerja
 - Sosialisasi Budaya Kerja Istimewa bagi Pekerja
 - Sosialisasi Norma K3
 - Sosialisasi K3
 - Pelatihan K3 Teknisi Listrik
 - Pelatihan Operator Genset
 - Pelatihan Petugas Peran Kebakaran
- 5). Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa
- 6). Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Wilayah Selatan
- 7). Pelayanan Ketenagakerjaan di Tingkat Kalurahan (Peladi Makarti)

c. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Indikator Program : Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik
Target 40% tercapai 40% (100%), capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan DIY di BLKPP, di mana Akun Sibukin mencapai 1.562 orang. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 171 orang dari jumlah pendaftar sebanyak 720 orang.

Gambar III.3 Sosialisasi Inovasi Layanan Publik



Faktor Pendukung keberhasilan

1. Program dan kurikulum pelatihan berdasarkan kebutuhan industri sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai
2. Kerja Sama dengan Industri dalam bentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Dengan Industri (FKLPID) untuk menjamin penyerapan lulusan pelatihan.
3. Adanya program sertifikasi dan *On The Job Training* pasca pelatihan untuk mendorong penempatan
4. Ketersediaan data dan sistem monitoring terkait tingkat produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu
5. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk penghargaan bagi perusahaan produktif, pelatihan peningkatan produktivitas dan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas

Faktor Penghambat keberhasilan

1. Meskipun berbasis kompetensi, beberapa materi pelatihan belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan teknologi atau industri terkini.
2. Kurangnya *Soft Skills* Peserta
3. Lokasi kerja yang jauh atau terbatasnya akses transportasi dapat menjadi penghalang bagi peserta untuk menerima pekerjaan tertentu.
4. Perusahaan yang terlalu fokus pada efisiensi operasional mungkin kurang mengalokasikan waktu atau sumber daya untuk inovasi, yang dapat menghambat pembinaan yang bertujuan memperluas kreativitas.
5. Perusahaan menghadapi kendala finansial untuk mengadopsi teknologi baru atau melaksanakan pelatihan lanjutan untuk peningkatan produktivitas.

3.1.3 Sasaran 2: Meningkatnya Kesempatan Kerja

Kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	Rata-rata persentase penempatan dan persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja

Sumber : sengguh.jogjaprovo.go.id

Kinerja sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi *		
1	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	n/a	67,5 %	87 % ((74,74 + 100,15)/ 2)	128,89 % (87/67,5 x 100%)	75 %	116 % (87/75 x 100%).

Sumber : sengguh.jogjaprovo.go.id

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Kesempatan Kerja pada indikator adalah sebagai berikut:

Indikator : Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja

- a. Tercapai 87% melebihi target, dihitung dari persentase penempatan 74.74% (dari data IPK ada 6118 penempatan dari 8186 pencari kerja) ditambah persentase pemberdayaan TK sebesar 100.15% (dari 18.248 tenaga kerja yang terlibat dibagi 18.220 tenaga kerja yang diusulkan) dibagi 2, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 128,89% (terlampau).
- b. Tidak bisa dibandingkan realisasi tahun lalu karena tahun 2023 belum ada target.
- c. Capaian target indikator tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 116%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.10 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam penyusunan RTK	5	5	100
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik	45	46	102.22
		Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	90	100	111.11
		Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	90	100	111.11
	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	25 Orang	25 Orang	100%
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	25 Orang	25 Orang	100%
	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	15 Orang	15 Orang	100%
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	6315 Orang	6315 Orang	100%
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online(KarirHub)	50 Orang	50 Orang	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi				
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	40 Orang	100%

Sumber : sengguh.jogjapro.go.id

Capaian tersebut didukung dari:

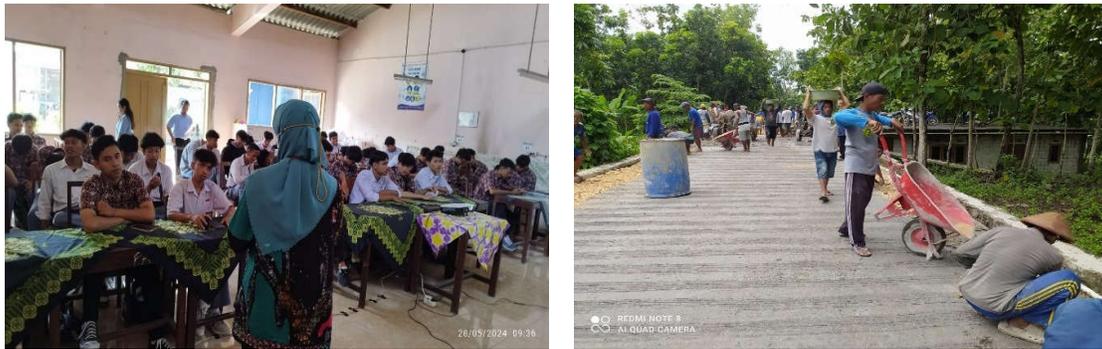
a. Capaian Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Program : Jumlah kabupaten, kota yang dibina dalam penyusunan RTK Target 5 kab./kota tercapai seluruhnya (100%), capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro, dengan melakukan perjalanan dinas dalam rangka pembinaan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah ke 5 kab./kota di DIY.

b. Capaian Program Penempatan Tenaga Kerja

- 1) Indikator Program : Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik, Target 45% tercapai 46% (102,22%), jumlah lembaga penempatan dengan kinerja "baik" (kategori "baik" berdasarkan Lembaga sudah memiliki MOU dengan perusahaan) 7 lembaga dari 15 lembaga yang sudah diberi pembinaan. Capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi.
- 2) Indikator Program : Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi Target 90% tercapai 100% (111,11%), jumlah usulan yang masuk sebanyak 7 kapanewon dapat difasilitasi seluruhnya. Capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Indikator Program : Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi Target 90% tercapai 100% (111,11%), jumlah usulan yang masuk sebanyak 822 lokasi dapat difasilitasi seluruhnya. Capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja melalui pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur.

Gambar III.4 Sosialisasi Karirhub dan Pelaksanaan Padat Karya



Faktor Pendukung keberhasilan

Kebijakan pemerintah kabupaten yang menggunakan/menetapkan jumlah tenaga kerja di lokasi lebih banyak daripada angka ketentuan minimal.

Faktor Penghambat keberhasilan

Capaian serapan tenaga kerja banyak yang terserap di akhir tahun (TW IV) karena banyak lokasi kegiatan dilaksanakan di TW IV yang salah satu di antaranya karena ada pergeseran lokasi.

3.1.4 Sasaran 3: Meningkatnya layanan ketenagakerjaan

Kinerja sasaran Meningkatnya layanan ketenagakerjaan diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya layanan ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
2		Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	Jumlah perusahaan yang memberikan upah lebih dari/sama dengan upah minimum, mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS, memenuhi syarat K3

Sumber : sungguh.jogjaprovo.go.id

Kinerja sasaran Meningkatnya layanan ketenagakerjaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	n/a	2629 perusahaan	2630 perusahaan	100,04% (2630/2629 x 100%)	2659 perusahaan	98,91 % (2630/2659 x 100%).
2	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	n/a	2748 perusahaan	2750 perusahaan	100,07% (2750/2748 x 100%)	2808 perusahaan	97,93 % (2750/2808 x 100%).

Sumber : sengguh.jogjaprovo.go.id

Analisis Ketercapaian Sasaran 3 : Meningkatnya layanan ketenagakerjaan pada kedua indikator adalah sebagai berikut:

- 1). Indikator : Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
 - a. Target 2629 perusahaan tercapai 2630 perusahaan, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100,04% (terlampau).
 - b. Tidak bisa dibandingkan realisasi tahun lalu karena 2023 belum ada target.
 - c. Capaian target indikator tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 98,91%.
- 2). Indikator : Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3
 - a. Target 2748 perusahaan tercapai 2750 perusahaan, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100,07% (terlampau).
 - b. Tidak bisa dibandingkan realisasi tahun lalu karena 2023 belum ada target.
 - c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 97,93%.

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dan Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.13 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 3

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	97	100	103.09
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	210 Perkara	210 Perkara	100%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	10 Perkara	100%
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	8 asosiasi	8 asosiasi	100%
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	5 Perusahaan	6 Perusahaan	120%
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)				
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 SK	2 SK	200%
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	300 Orang	300 Orang	100%
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan	65	100	153.85

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	90	100	111.11
		Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja	88,9	100	112%
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	940 Perusahaan	1416 Perusahaan	150%
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3_BK3	15 Perusahaan	20 Perusahaan	133%

Sumber : sungguh.jogjaprov.go.id

Capaian tersebut didukung dari:

a. **Capaian Program Hubungan Industrial**

Indikator Program : Persentase jumlah layanan yang terselesaikan

Target 90% tercapai 100%, dari 18 pengajuan layanan penyusunan PP/PKB dan Struktur Skala Upah dapat diselesaikan semua. Capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi dan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Gambar III.5 Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial



b. Capaian Program Pengawasan Ketenagakerjaan

- 1) Indikator Program : Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan,
Target 65% tercapai 100% (153,85%), sebanyak 1.164 rencana kerja pemeriksaan dan pengujian perusahaan terkait norma kerja dapat diselesaikan seluruhnya. Capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan.
- 2) Indikator Program : Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan
Target 90% tercapai 100% (111,11%), sebanyak 252 perusahaan sesuai rencana kerja pemeriksaan dan pengujian perusahaan terkait norma K3 dapat diselesaikan seluruhnya. Capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan.
- 3) Indikator Program : Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja
Target 90% tercapai 100% (111,11%), jumlah pemohon pelayanan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja sebanyak 46 perusahaan dan dapat terlayani. Capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan di Balai K3.

Gambar III.6 Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan kesehatan di perusahaan



Faktor Pendukung keberhasilan

1. Pegawai mediator aktif melakukan pembinaan ke perusahaan dan perusahaan bersikap kooperatif terkait penyesuaian materi PP dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Perencanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Unit Pengawasan menjadikan kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran.

Faktor Penghambat keberhasilan

Jumlah perusahaan dalam skala mikro dan kecil yang cukup banyak dan memerlukan pendekatan tersendiri dalam pola pengawasannya, kondisi perekonomian global yg sedang lesu.

3.1.5 Sasaran 4 : Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Hasil penilaian kategori Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY pada tahun n

Sumber : sengguh.jogjaprovo.go.id

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.15 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A (nilai 91,46)	A (nilai 93,93)	A / 102,7% (93,93/ 91,46 x 100%)	A	A

Sumber : sengguh.jogjaprovo.go.id

Analisis Ketercapaian Sasaran 4 : Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah pada indikator adalah sebagai berikut:

Indikator : Kategori RB Perangkat Daerah

- Target kategori A nilai 91,46 tercapai kategori A nilai 93,93 melebihi target, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 102,7% (terlampau).
- Dibandingkan realisasi tahun 2023 capaiannya sama yaitu kategori A dengan nilai lebih tinggi di mana tahun 2023 nilainya 91,45.
- Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 100% kategori A.

Keberhasilan capaian Sasaran 4, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.16 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 4

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah_dinas	88.5	91,46	103,34
		BLKPP	88.5	90,64	102,24
		BK3	88.5	92,2	104,18

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang	178 Orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	100%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit	100%

Sumber : sungguh.jogjaprovo.go.id

Capaian realisasi indikator Sub Kegiatan Program Penunjang di BLKPP dan Balai K3 seluruhnya tercapai 100% (sesuai target).

Capaian tersebut didukung dari :

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program : Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Target 88,5 dinas tercapai 91,46, BLKPP tercapai 90,64 dan BK3 tercapai 92,2, sehingga persentase capaian di atas 100% semua. Capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Gambar III.7 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Fasilitas Ruang Rapat Mediasi Pekerja



Faktor Pendukung keberhasilan

Komitmen/dukungan pimpinan dan pegawai serta penerapan teknologi informasi dalam mempercepat proses pelayanan publik.

Faktor Penghambat keberhasilan

Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten dalam mendukung perubahan.

3.1.6 Sasaran 5 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat

Kinerja sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	Jumlah transmigran yang menetap di lokasi pada tahun n dibagi dengan jumlah transmigran yang ditempatkan pada tahun n-2 kali 100%

Sumber : sungguh.jogjaprovo.go.id

Kinerja sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 18 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	100%	90 %	100% (30/30 x 100%)	111,11% (100/90 x 100%)	90%	111,11% (100/90 x 100%)

Sumber : sengguh.jogjaprovo.go.id

Analisis Ketercapaian Sasaran 5 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat pada indikator adalah sebagai berikut:

Indikator : Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi

- a. Target 90% tercapai 100% melebihi target, dari 30 KK transmigrasi yang ditempatkan pada tahun 2022, sampai dengan akhir 2024 tidak ada yang Kembali dan masih bertahan di lokasi transmigrasi, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 111,11% (terlampau).
- a. Dibandingkan realisasi tahun 2023 capaiannya sama yaitu 100%
- b. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 111,11%.

Keberhasilan capaian Sasaran 5, dengan Indikator Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.19 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 5

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	77	125	162.34
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja sama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja sama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	16 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	125%

Sumber : sungguh.jogjapro.go.id

Capaian tersebut didukung dari :

Capaian Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator Program : Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan

Target 77% tercapai 125%, jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 20 KK dibagi 16 KK yang dilatih sehingga persentase capaian 162,34%. Capaian didukung oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Gambar III.8 Pembekalan dan Pemberangkatan Calon Transmigrasi



Faktor Pendukung keberhasilan

1. Hak-hak transmigran terpenuhi : catu pangan, RTJK, Lahan Usaha I dan paket bantuan Paket A dan B (bibit tanaman dan pupuk).
2. Informasi potensi lokasi transmigrasi tersampaikan dengan baik sesuai arah minat calon transmigrasi.

Faktor Penghambat keberhasilan

Daftar tunggu pemberangkatan transmigrasi semakin panjang karena jumlah alokasi terbatas ditentukan oleh Pusat.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1 Capaian SDG's

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkontribusi terhadap capaian pada 3 (tiga) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dengan capaian SDG's tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.20 Capaian SDGs

Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun

Nama Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Ket
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional				
Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	Orang	469.819	567.389	Tercapai

Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua

Nama Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Ket
Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya				
Upah Rata - Rata per bulan pekerja	Rp.	2.210.919	2.703.803	Tercapai
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,63	3,48	Tercapai
Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi	%	5,15	5,55	Belum tercapai
Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan				
Penduduk Usia Kerja Umur 15 - 24 Tahun yang Tidak Sedang Bekerja, Tidak Sedang Bersekolah, dan Tidak Sedang Mengikuti Pelatihan	%	45.859 sd 64.559	59.322	Tercapai
Target 8.7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya				
Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi	%	1,73 sd 2,06	1,28	Tercapai

Target 8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya				
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3	Perusahaan	274	274	Tercapai

Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara

Nama Indikator	Sumber Data	Target (org)	Realisasi (org)	Ket
Target 10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar				
Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jiwa	469.819	567.389	Tercapai

Capaian SDGs tahun 2024 didapatkan hasil dari tiga tujuan (tujuan 1, tujuan 8 dan tujuan 10) dengan 8 indikator yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebanyak 7 (tujuh) indikator tercapai. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian serta program ketenagakerjaan yang berjalan dengan baik.

Untuk 1(satu) indikator yaitu Tingkat Setengah Pengangguran yang belum tercapai upaya yang dilakukan antaran lain

- a. Meningkatkan pelatihan ketrampilan serta mendorong efektivitas informasi pasar kerja agar tenaga kerja dapat beralih dari pekerjaan informal ke sektor formal
- b. Memberikan pelatihan kewirausahaan untuk dapat memberikan tambahan pekerjaan selain pekerjaan utama
- c. Memberikan pelatihan peningkatan produktivitas untuk mendorong peningkatan produksi
Penyesuaian pekerjaan bagi tenaga kerja yang memiliki keterbatasan akses melalui pelatihan *digital marketing*.

3.2.2 Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)

Capaian kinerja pembangunan ketenagakerjaan yang diukur melalui Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK), dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.21 Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)

Indikator	Indeks		Keterangan
	2023	2024	
Perencanaan Tenaga Kerja	9,95	9,55	Turun
Penduduk dan Tenaga Kerja	8,28	8,19	Turun
Kesempatan Kerja	10,37	10,34	Turun
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	12,07	12,03	Turun
Produktivitas Tenaga Kerja	3,85	6,44	Naik
Hubungan Industrial	2,96	3,56	Naik
Kondisi Lingkungan kerja	6,01	6,52	Naik
Pengupahan dan kesejahteraan Pekerja	10	10	Nilai Maksimal
Jaminan Sosial tenaga Kerja	10	10	Nilai Maksimal
Total Indeks Pembangunan ketenagakerjaan	73,50	76,62	

Sumber : Kemenaker RI 2024

Dari 9 (sembilan) indikator utama, sebanyak 8 (delapan) indikator capaiannya masuk katagori baik (≥ 5) sedangkan 1 (satu) indikator utama capaiannya belum baik yaitu indikator Hubungan Industrial. Hal ini disebabkan karena kondisi pasca pandemi *Covid-19* yang sangat berdampak pada hubungan industrial yang belum membaik sepenuhnya. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan DIY tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,12 poin dibanding tahun 2023 menjadi 76,62 dan merupakan peringkat ke-3 dari 34 provinsi.

Gambar III.9 Sertifikat Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan



Upaya yang dilakukan untuk perbaikan indikator mengalami penurunan antara lain :

1. Meningkatkan layanan penempatan kerja bagi pencari kerja melalui inovasi aplikasi yang dapat di akses sampai dengan tingkat kelurahan.
2. Mendorong pelatihan kerja negeri (BLK) dan swasta (LPK) untuk meningkatkan kinerja dengan mengikuti program akreditasi LPK.
3. Melakukan pembinaan dan deteksi dini ke perusahaan untuk mencegah peningkatan kasus hubungan industrial yang diselesaikan secara Tripartit.
4. Mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan menyusun PP/PKB, Struktur Skala Upah dan tenaga kerja terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.

3.2.3 Capaian kinerja Pelaksanaan APBN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2024 memperoleh mandat melaksanakan anggaran dekonsentrasi bersumber dana APBN dalam 5 (lima) Program kegiatan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun capaian/realisasi keuangan dan fisik tergambar pada tabel berikut :

Tabel III.22 Capaian Kinerja Pelaksanaan APBN

No	Nama Program	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik %
			Rp	%	
1	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen PTK dan PKK)	358.975.000	352.979.700	98.33	100
2	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen PHI dan JSTK)	504.724.000	504.265.207	99.91	100
3	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen Binwasnaker)	388.528.000	384.164.880	98.88	100
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Ditjen Binalavotas)	2.697.266.000	2.686.852.485	99.61	100
5	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	437.390.000	433.067.300	99.01	100
Total		4.493.646.000	4.466.002.131	99.15	100

Sumber: sungguh.jogjaprovo.go.id

3.2.4 Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian tujuan, sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat *cascading* Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Tujuan, Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III.23 Kontribusi Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terhadap Capaian Tujuan Pemerintah Daerah

No	Tujuan Pemda	Indikator	Target	Realisasi	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator tujuan	Target	Realisasi
	Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	1. Indeks Pertumbuhan Inklusif/ <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 2. Indeks Kebahagiaan	6,42 73,41	6,24 71,7	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas DIY	Rp 54,09 juta/tenaga kerja	Rp 57,08 juta/tenaga kerja

Sumber : RPJMD 2022-2027, sungguh.jogjaprovo.go.id

Tabel III.24 Kontribusi Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemda	Indikator	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran	Target	Realisasi
	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,16	10,4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	90%	100%
	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	a) Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB b) TPT c) Inflasi d) Pendapatan Per Kapita (RpJuta)	5,1 - 5,6 3,8 - 3,45 2-4 30,23	4,95 3,48 1,85 12,9	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	75%	75%
						Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	65%	68%
					Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	67,50%	87%

No	Sasaran Pemda	Indikator	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran	Target	Realisasi
					Meningkatnya layanan ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2.629 Perusahaan	2.630 Perusahaan
						Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	2.748 Perusahaan	2.750 Perusahaan
					Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori A (nilai 91,46)	Kategori A (nilai 93,93)

Sumber : RPJMD 2022-2027, sengguh.jogjaprovo.go.id

Penjelasan :

1. Capaian indikator tujuan pemda yaitu IGI dan indeks kebahagiaan dipengaruhi oleh ketercapaian indikator tujuan Disnakertrans yaitu Tingkat Produktivitas DIY.
2. Indikator sasaran Pemda Angka Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh ketercapaian indikator 5 (lima) sasaran Disnakertrans.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memiliki ketugasan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi memiliki peran menyiapkan lulusan pelatihan yang siap ditempatkan, membuka kesempatan kerja, memberdayakan masyarakat dan memberikan layanan ketenagakerjaan sehingga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran dan Tingkat kemiskinan.
4. Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga diukur keberhasilan tata kelolanya melalui Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.

Tabel III.25 Kontribusi Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No.	Program Pemda	Indikator Program Pemda	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi
	1.1.1.1) Program Pemerataan Kesejahteraan	1. Indeks Gini 2. Persentase Desa Mandiri	0,419 62,24		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	77%	125%	162,34
	1.1.2.1) Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	3,1		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	80%	95,50%	119,38
						Persentase peserta pelatihan yang terampil	95%	98%	103,16
						Persentase peserta magang yang ditempatkan	60%	74%	123,33
						Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi	100%	100%	100
						Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya di atas standar	90%	100%	111,11
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja	100%	100%	100
						Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	80%	95,5%	119,38
						Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	100%	100%	100
						Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan	31%	37%	119,35
						Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja di kawasan selatan	70%	100%	142,86

No	Program Pemda	Indikator Program Pemda	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi
						Persentase penumbuhan calon wirausaha baru	70%	83%	118,57
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	40%	40%	100
					PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK	5 Kab/ kota	5 Kab/ kota	100
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik	45%	46%	102,22
						Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	90%	100%	111,11
						Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	90%	100%	111,11
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	97%	100%	103,09
					PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan	65%	100%	153,85
						Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	90%	100%	111,11
						Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja	88,90%	100	112

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,5	91,46	103,34
--	--	--	--	--	---	--	------	-------	--------

Sumber : RPJMD 2022-2027, sungguh.jogjaprovo.go.id

Penjelasan :

1. Program Pemda Pengembangan sektor unggulan yang diukur dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, industri pengolahan dan akomodasi makan minum dipengaruhi oleh pengelolaan/ketercapaian :
 - 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 2) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan
 - 3) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - 4) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - 5) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 6) Program Hubungan Industrial
 - 7) Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemda Pemerataan Kesejahteraan yang diukur dengan Indeks Gini dan Pemerataan Desa Mandiri dipengaruhi oleh pengelolaan/ketercapaian Program perangkat daerah yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

3.3 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
				Target	Realisasi	Persentase	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
A	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas DIY	Juta/Tenaga Kerja	54,09	57,08	105,53				
1	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	75	75	100	39.915.576.350	37.848.854.750	94,82	2.066.721.600
2		Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	%	65	68	104,62				
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	%	67,50	87	128,89	71.969.000	71.739.544	99,68	229.456
4	Meningkatnya layanan ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS	Perusahaan	2.629	2.630	100,04	1.007.215.500	948.224.677	94,14	58.990.823
5		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan	Perusahaan	2.748	2.750	100,07				
6	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RIB Perangkat Daerah	Kategori	A	A	100	34.773.769.058	33.015.803.355	94,94	1.757.965.703
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	%	90	100	111,11	200.000.000	197.046.100	98,52	2.953.900
Jumlah							75.968.529.908	72.081.668.426	94,88	3.886.861.482

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Th 2024, Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Th 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja sebesar Rp75.968.529.908,00 terealisasi Rp72.081.668.426,00 atau 94,88% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp3.886.861.482,00 atau 5,12% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi penggunaan listrik
- Efisiensi honor narasumber dan peserta kegiatan
- Efisiensi sewa tempat kegiatan

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

1. Pemanfaatan media sosial seperti *Facebook, twitter, google (email/drive)* dan Instagram untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi dan kemudahan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan pengembangan aplikasi Layanan Pengaduan SASADHARA dan E - MAKARTI
3. Sistem Informasi Pengendalian Padat Karya untuk Pengelolaan data padat karya melalui sistem sehingga lebih terstruktur dan memudahkan dalam aksesnya.
4. Pemanfaatan aplikasi SIBUKIN untuk mempermudah peserta mendaftar pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan ketrampilan.
5. Pengembangan layanan ketenagakerjaan di tingkat kalurahan melalui Paladi Makarti.

3.5 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan di tengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.27 Inventarisasi Lintas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Peningkatan kompetensi angkatan kerja	OPD	Melaksanakan pelatihan institusional, pelatihan ketrampilan, sertifikasi uji kompetensi, pemagangan, bimtek dan akreditasi LPK, pembangunan karakter angkatan kerja dan sosialisasi budaya kerja, pembina produktivitas	tenaga kerja kompeten, LPK	masyarakat pencari kerja	Bagi OPD 1.1 Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja 1.2 Mendukung pencapaian kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Bagi kelompok sasaran : 1.1 Peningkatan daya saing ke pasar kerja 1.2 Peningkatan kualitas pelatihan
		BLKPP, BLK Kabupaten	Fasilitasi Sarana prasarana, instruktur, materi pelatihan			
		Dinas tenaga kerja Kab./kota	Pembina LPK			
		Perusahaan	Tempat magang dan pendampingan			
		LPK	meningkatkan kualitas pelatihan dengan akreditasi			
		Kemenaker RI	Pelaksana G to G Magang Jepang			
		lembaga lain	penyelenggara akreditasi dan penerbit sertifikat kompetensi			
2	Peningkatan kesempatan kerja	OPD	penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, bimbingan jabatan, informasi pasar kerja, perlindungan CPMI	Penempatan tenaga kerja	angkatan kerja	Bagi OPD 1.1 Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kesempatan kerja 1.2 Mendukung pencapaian kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja Bagi kelompok sasaran : 1.1 Peningkatan penempatan tenaga kerja 1.2 Pengurangan pengangguran 1.3 Peningkatan pendapatan
		OPD terkait	Penganggaran, pengendalian kegiatan dan proses kerja sama			

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Dinas ketenagakerjaan Kab./kota	penyedia data IPK dan lokasi padat karya			
		BP3MI	penempatan luar negeri			
		SMK/BKK SMK	data siswa/calon angkatan kerja			
		Kemenaker RI	Dukungan program kegiatan dan pembinaan			
		Kalurahan/ Kapanewon	layanan ketenagakerjaan di kalurahan, pelaksana padat karya			
		perusahaan	data lowongan kerja			
3	Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	OPD	Penetapan upah minimum, pembinaan sarana hubungan industrial, pemeriksaan norma kerja dan norma K3, pembinaan jaminan sosial	Kesejahteraan pekerja	Tenaga kerja	Bagi OPD 1.1 Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan layanan ketenagakerjaan 1.2 Mendukung pencapaian kinerja Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan Bagi kelompok sasaran : 1.1 Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 1.2 Peningkatan perlindungan tenaga kerja
		OPD terkait	Penganggaran, pengendalian kegiatan dan proses kerja sama			
		Asosiasi Pengusaha	rekomendasi besaran upah minimum, pembinaan dan pemantauan ketenagakerjaan			
		Serikat Pekerja	rekomendasi besaran upah minimum, pembinaan dan pemantauan ketenagakerjaan			
		Perusahaan/ dunia usaha	pemberi kerja dan upah tenaga kerja			
		BPJS ketenagakerjaan	pelaksana jaminan sosial			

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
4	Peningkatan pelayanan publik	OPD	Fasilitasi sarana prasarana pelayanan publik, pembinaan dan pengembangan SDM	IKM meningkat	Masyarakat	Bagi OPD 1.1 Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah 1.2 Mendukung pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bagi kelompok sasaran : 1.1 Peningkatan akses dan kualitas layanan publik 1.2 Terselenggaranya <i>Good Governance</i>
		OPD dan <i>stakeholder</i> terkait	Penganggaran, pengendalian kegiatan, proses kerja sama, penyedia barang dan jasa			
5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi	OPD	Fasilitas kerja sama antar daerah, pendataan calon transmigran, pelatihan, pembekalan dan pemindahan transmigran	penempatan transmigrasi	masyarakat	Bagi OPD 1.1 Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat 1.2 Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Bagi kelompok sasaran : 1.1 Peningkatan kesejahteraan 1.2 Penurunan angka kemiskinan
		Kementerian PDT Trans	Penetapan alokasi trans, pembina kerja sama antar daerah, penerbit surat perintah pemberangkatan trans			
		OPD terkait	proses kerja sama, penganggaran, DTKS			
		Daerah tujuan transmigrasi	Kerja sama antar daerah, daerah tujuan transmigrasi			
		Dinas tenaga kerja Kab./kota	Data calon transmigrasi			

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja tujuan (1 indikator), kinerja sasaran (7 indikator) dan kinerja program (22 indikator) seluruhnya tercapai/terlampaui.
2. Hambatan dalam pencapaian kinerja antara lain :
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas.
 - b. Perubahan kebijakan yang berimbas pada penyesuaian anggaran maupun target kinerja dan sering kali terjadi di akhir tahun anggaran.
 - c. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi baik intern pegawai maupun masyarakat.
3. Faktor kunci keberhasilan pencapaian kinerja :
 - a. Target kinerja diperhitungkan dengan jelas dan terukur.
 - b. Komitmen pimpinan dan pegawai melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.
 - c. Koordinasi dan evaluasi serta pengelolaan waktu yang baik dalam pelaksanaan program kegiatan supaya tepat waktu.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pelatihan SDM dalam meningkatkan kinerja pegawai.
2. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif baik di lingkungan internal maupun dengan OPD lintas sektor dan *stakeholder* terkait.
3. Inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

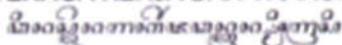
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 2022	Tahun 1 2023	Tahun 2 2024	Tahun 3 2025	Tahun 4 2026	Tahun 5 2027	2027
1	Tingkat produktivitas DIY	Rp 50,38 juta/tenaga kerja	Rp 51,93 juta/tenaga kerja	Rp 54,09 juta/tenaga kerja	Rp 56,37 juta/tenaga kerja	Rp 58,78 juta/tenaga kerja	Rp 61,19 juta/tenaga kerja	Rp 61,19 juta/tenaga kerja
2	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan.	75%	n/a	75%	75%	75%	75%	75%
3	Persentase perusahaan dengan katagori produktivitas baik	n/a	n/a	65%	70%	75%	80%	80%
4	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	990 orang	1020 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	63,53 %	n/a	67,5%	70%	72,5%	75%	75%
6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	11.000 orang	11.100 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2609 perusahaan	n/a	2.629 perusahaan	2.639 perusahaan	2.649 perusahaan	2.659 perusahaan	2.659 perusahaan
8	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	2.708 perusahaan	n/a	2.748 perusahaan	2.768 perusahaan	2.788 perusahaan	2.808 perusahaan	2.808 perusahaan
9	Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3	3.300 layanan	3.441 layanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A
11	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	n/a	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman (55262), Telp (0274)885147, Faks (0274)885036
Website : naketrans.jogjaprov.go.id, Email : dsnaketrans@jogjaprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya penetapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIA NUGRAHADI, ST., M.Eng.
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGGU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 24 Oktober 2024


PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGGU BUWONO X


PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DIY,
ARIA NUGRAHADI, ST., M.Eng.
NIP. 19740919 199903 1004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas DIY	Juta rupiah/tenaga kerja	54,09	Triwulan I	54,09
					Triwulan II	54,09
					Triwulan III	54,09
					Triwulan IV	54,09*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	%	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90
2.	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	75	Triwulan I	13
					Triwulan II	39
					Triwulan III	66
					Triwulan IV	75
3.		Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	%	65	Triwulan I	0
					Triwulan II	20
					Triwulan III	40
					Triwulan IV	65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	%	67,50	Triwulan I	10
					Triwulan II	25
					Triwulan III	45
					Triwulan IV	67,50
5.	Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan	2.629	Triwulan I	2.598
					Triwulan II	2.608
					Triwulan III	2.618
					Triwulan IV	2.629
6.		Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	Perusahaan	2.748	Triwulan I	2.728
					Triwulan II	2.733
					Triwulan III	2.740
					Triwulan IV	2.748
7.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A (91,46)	Triwulan I	A (91,46)
					Triwulan II	A (91,46)
					Triwulan III	A (91,46)
					Triwulan IV	A (91,46) *

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Activate

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja (APBD)	Rp10.000.000,00
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD)	Rp39.850.000,00
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja (APBD)	Rp61.969.000,00
4.	Program Hubungan Industrial (APBD)	Rp314.100.000,00
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan (APBD)	Rp308.875.000,00
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp15.304.890.000,00
7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (APBD)	Rp200.000.000,00
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp.31.644.423.458,00
Jumlah Anggaran		Rp47.884.107.458,00

- Anggaran yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas

No.	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD, DBHCHT)	Rp23.118.790.750,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp722.065.600,00
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dais)	Rp81.600.000,00
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp2.098.536.300,00
Jumlah Anggaran		Rp26.020.992.650,00

- Anggaran yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No.	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD)	Rp434.220.000,00
2.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan (APBD)	Rp384.240.500,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp1.029.939.300,00
Jumlah Anggaran		Rp2.062.559.800,00

Act
Go to

4. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
5. Mengelola anggaran dekonsentrasi sebesar Rp4.683.310.000,00 terdiri atas :
 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Ditjen Binalavotas Rp2.697.266.000,00.
 2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Dukungan Manajemen Ditjen PPTK dan PKK Rp358.975.000,00.
 3. Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan HI dan JSTK Rp680.297.000,00
 4. Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Wasnaker dan K3 Rp388.528.000,00
 5. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp558.244.000,00.


PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
[Signature]
HAMENGGU BUWONO X

Yogyakarta, 24 Oktober 2024


PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DIY,
DISNAKERTRANS
[Signature]
ARIA NUGRAHADI, ST., M.Eng
NIP. 19740919 199903 1004

Lampiran 3. Evaluasi AKIP Tahun 2023

	PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA INSPEKTORAT <i>amajaja-anjasmajaj</i> Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telp: (0274) 562000 Fax: (0274) 512567 Website http://inspektorat.jogjaprov.go.id e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166
Yogyakarta, 18-3-2024	
Nomor : 700 / 464	Kepada
Sifat : Biasa	Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
Lampiran : -	di -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2023	Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelambagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelambagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. Keputusan...g

- f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 432/KEP/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 061/INS/2024 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, ditetapkan tanggal 22 Februari 2024.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Sasaran Evaluasi

Sasaran evaluasi adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2023.

5. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

6. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi

dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisa dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

7. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kodudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan kluster kompetensi;
- d. pelaksanaan hygiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja dan keselamatan kerja;
- e. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, dan tempat uji kompetensi;
- f. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi serta pengukuran dan konsultasi produktivitas;
- g. pelaksanaan dan pembinaan program pemagangan dalam dan luar negeri;
- h. penciptaan dan pembinaan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja;
- i. perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan sesudah bekerja;
- j. pengelolaan penempatan tenaga kerja dan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja;
- k. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial;
- l. pembinaan pengupahan dan penyiapan penetapan upah minimum;
- m. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
- n. pelaksanaan pengujian hygiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja;
- o. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- p. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- q. pelaksanaan dekonstruksi dan tugas pembantuan;
- r. pemantauan, ...

- r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- t. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian umum;
 - 2) Kelompok Substansi Program; dan
 - 3) Kelompok Substansi Keuangan
- c. Bidang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - 2) Seksi Transmigrasi.
- d. Bidang Pembinaan, Pelatihan, Standardisasi, dan Pemagangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pelatihan, dan Standardisasi; dan
 - 2) Seksi Pemagangan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Hubungan Industrial; dan
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja; dan
 - 2) Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Jabatan fungsional.

8. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;

- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
 - c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;
 - d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi lain dalam peningkatan kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yaitu:
 - a. Aplikasi SASADHARA (Sarana Sawji Advokasi Hubungan Industrial) yang memberikan kemudahan akses bagi tenaga kerja untuk menyampaikan pengaduan. Sehingga kasus-kasus ketenagakerjaan dan perselisihan hak dapat lebih cepat ditangani.
 - b. c. Makortri (Bistom Asesmen, Pendampingan, dan Manajemen Antar Kerja Terintegrasi), terobosan untuk menekan angka pengangguran melalui upaya strategis dan kolaboratif dalam mempersiapkan angkatan kerja unggul yang mempunyai kesiapan, kompetensi dan daya saing untuk memasuki dunia kerja, sekaligus sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan yang disebabkan oleh masih tingginya angka pengangguran, khususnya tingkat pengangguran usia muda (18 s.d 24 tahun).
- 9. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Terdapat rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY telah merindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah baik, yang selama ini sudah diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, dan telah meningkatkan kinerja internal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan memanfaatkan Teknologi Informatika

untuk...}

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (yaitu menerapkan aplikasi SASADHARA dan e-Makart);

- b. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY memperoleh nilai sebesar 90,33. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,90 atau 89,68% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,87 atau 89,57% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,81 atau 92,05% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 22,75 atau 91,00% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY agar:

- a. Meningkatkan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja tidak hanya pada level output yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjangka, pencapaian-pencapaian khususnya pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Hubungan Industrial, Program Pengawasan Ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu mewujudkan tercapainya Basaran Pemerintah Daerah DIY yaitu meningkatnya kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat.
- b. Mempertahankan kinerja yang sudah baik, yang selama ini telah diterapkan, sehingga kedepannya hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar lebih baik lagi;

c. Meningkatkan ... 7.

- c. Meningkatkan layanan ketenagakerjaan kepada masyarakat dengan pemanfaatan media sosial berbasis Teknologi Informatika (TI) guna percepatan komunikasi, informasi, sosialisasi dan edukasi ketenagakerjaan di wilayah DIY

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY memperoleh nilai 90,33. Nilai tersebut masuk dalam kategori AA dengan interpretasi Sangat Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Damikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


SEKRETARIS DAERAH Istimewa Yogyakarta
DAERAH Istimewa Yogyakarta
MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP 19671004 199203 1 006

Tembusan:
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**